

ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP BERITA PERISTIWA GRAHADI SURABAYA PADA DINAS KOMINFO PROVINSI JATIM

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF GRAHADI SURABAYA INCIDENT NEWS BY EAST JAVA PROVINCIAL KOMINFO

Nikita¹, Nara Garini Ayuningrum², Mohammad Insan Romadhan³

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nikitamusa900@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: <i>Diterima: 05/05/2026</i> <i>Direvisi: 25/06/2026</i> <i>Publikasi: 29/06/2026</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana dalam pemberitaan Peristiwa Grahadi Surabaya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa teks berita institusional tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi kepentingan dalam membentuk citra, legitimasi, dan persepsi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang mencakup dimensi teks, praktik diskursus, dan praktik sosial, dengan data berupa dua berita resmi yang dianalisis melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penonjolan peran pemerintah sebagai aktor utama, serta penggunaan strategi kebahasaan seperti diksi tertentu, kalimat pasif, dan pengaburan aktor yang mengarahkan fokus pada stabilitas. Pada tingkat diskursus, narasi institusional menjadi dominan, sedangkan pada tingkat sosial mencerminkan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa berita institusional tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial, sehingga diperlukan literasi media yang kritis dalam memaknainya.
e-ISSN: 3124-9019	
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Komunikasi Publik, Media Daring, Relasi kuasa. Keywords: <i>Critical Discourse Analysis,</i> <i>Public Communication,</i> <i>Online Media,</i> <i>Power Relation.</i>	ABSTRACT <i>This study aims to analyze the construction of discourse in the news coverage of the Grahadi Incident published by the Communication and Informatics Office of East Java Province. It is based on the assumption that institutional news texts are not entirely neutral, but are influenced by interests in shaping image, legitimacy, and public perception. This research employs a qualitative approach using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, covering the dimensions of text, discursive practice, and social practice, with data derived from two official news articles analyzed through documentation. The findings indicate an emphasis on the government as the main actor, supported by linguistic strategies such as specific diction, passive constructions, and the obscuring of certain actors, which shift the focus toward stability. At the discursive level, institutional narratives dominate, while at the social level, the discourse reflects power relations between the government and society. These findings confirm that institutional news not only conveys information but also constructs social reality, highlighting the importance of critical media literacy in interpreting news texts.</i>

PENDAHULUAN

Kondisi global saat ini ditandai dengan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah merambah ke berbagai sendi kehidupan. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah infrastruktur komunikasi, tetapi juga merevolusi cara masyarakat berinteraksi dan mengonsumsi informasi. Internet saat ini telah bertransformasi menjadi kebutuhan mendasar yang mendorong migrasi besar-besaran dari media konvensional menuju ekosistem media baru (Rafiq, 2020). Dalam lanskap ini, media massa daring (*online*) muncul sebagai kekuatan dominan yang menawarkan karakteristik pemberitaan yang dinamis, progresif, serta memiliki kecepatan penyebaran informasi yang melampaui batasan ruang dan waktu (Yusyama & Khoirunnisa, 2021). Namun, di balik kecepatan tersebut, muncul tantangan krusial mengenai bagaimana informasi dikonstruksi dan apakah objektivitas tetap terjaga di tengah arus berita yang begitu deras.

Media massa dalam ruang digital modern bukan lagi sekadar instrumen netral yang menyalurkan pesan. Sebaliknya, media merupakan aktor aktif yang memiliki kapasitas besar untuk mengonstruksi realitas, mengarahkan persepsi publik, hingga menggerakkan aksi kolektif di tengah masyarakat (Devi dkk., 2025). Realitas ini menunjukkan bahwa narasi yang diproduksi media memiliki dampak nyata terhadap pergeseran norma, budaya, serta perilaku masyarakat dalam menyikapi sebuah fenomena sosial.

Penelitian ini berfokus pada konstruksi wacana dalam berita yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terkait insiden yang terjadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam teks berita untuk merepresentasikan suatu peristiwa sekaligus sebagai sarana komunikasi institusional pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu peristiwa lokal yang memicu gejolak diskursus di ruang publik adalah Insiden Grahadi di Surabaya. Akar dari peristiwa ini adalah gelombang protes masif yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa dan kelompok buruh sebagai respons terhadap kebijakan nasional yang kontroversial, yakni pengesahan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Gedung Negara Grahadi, sebagai episentrum kekuasaan di Jawa Timur, menjadi sasaran utama massa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aksi yang semula berjalan damai berubah menjadi konflik ketika terjadi benturan fisik antara massa dengan aparat keamanan. Insiden tersebut berujung pada kerusakan fasilitas publik termasuk jebolnya pagar utama Gedung Grahadi serta tindakan represif yang memicu kontroversi mengenai penggunaan kekuasaan di ruang publik.

Dalam perspektif konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (2021), realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, realitas mengenai Insiden Grahadi yang diterima masyarakat merupakan hasil produksi simbolik yang dimediasi melalui bahasa. Sejalan dengan itu, pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough (2021) menegaskan bahwa teks berita selalu berada dalam jaringan praktik diskursif dan struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membuktikan adanya kemungkinan reproduksi relasi kuasa dalam narasi berita Dinas Kominfo Jatim yang membingkai peristiwa tersebut sesuai kepentingan stabilitas institusi.

Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) merupakan kebijakan pemerintah yang sejak awal pengesahannya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Regulasi ini dinilai membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, terutama ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan investasi. Sejumlah kelompok masyarakat, khususnya buruh, aktivis, dan mahasiswa, memandang

kebijakan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan hak pekerja serta melemahkan kontrol negara terhadap kepentingan publik. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak berhenti pada masa awal pengesahan, tetapi terus berlanjut hingga tahun 2025 seiring dengan penerapan aturan turunan dan dampak kebijakan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di berbagai daerah, penolakan tersebut diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah. Surabaya, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus pusat pemerintahan daerah, menjadi salah satu lokasi utama konsentrasi massa aksi.

Gedung Grahadi dipilih sebagai titik unjuk rasa karena memiliki makna simbolis sebagai representasi kekuasaan dan otoritas Dinas Kominfo provinsi. Kehadiran massa dalam jumlah besar, dinamika pengamanan aparat, serta ketegangan yang berkembang di lapangan menciptakan situasi yang rentan terhadap eskalasi konflik. Dalam kondisi tersebut, aksi demonstrasi yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi berubah menjadi Peristiwa di Grahadi Surabaya yang menarik perhatian publik terkait kondisi fasilitas dan situasi ketertiban umum. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat dalam merespons kebijakan publik yang kontroversial. Peristiwa Grahadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan anarkis, melainkan sebagai bagian dari konflik sosial dan politik yang lebih luas akibat ketidakseimbangan relasi kuasa dan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian publik melalui berbagai bentuk komunikasi resmi, salah satunya melalui berita yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

Pemberitaan media berperan penting dalam membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa di Grahadi Surabaya karena menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi serta menafsirkan makna suatu peristiwa. Oleh karena itu, analisis terhadap wacana yang dibangun dalam berita menjadi relevan untuk menelaah bagaimana peristiwa tersebut direpresentasikan, kepentingan apa yang disorot, serta relasi kuasa yang tercermin dalam narasi media. Dalam merespons situasi krisis, instansi pemerintah dan kepolisian menyampaikan berbagai pernyataan resmi yang kemudian diolah dan diberitakan oleh media daring. Dalam perspektif komunikasi organisasi, pemberitaan atas pernyataan resmi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai laporan faktual, tetapi juga menjadi bagian dari strategi manajemen krisis untuk menjaga citra institusi serta mengarahkan persepsi publik agar stabilitas keamanan tetap terjaga (Putri dkk., 2024). Pada konteks ini, posisi Dinas Kominfo Jatim menjadi menarik untuk diteliti. Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang berperan dalam pengelolaan komunikasi publik di Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai publikasi berita. Cara sikap dan narasi yang disampaikan melalui berita tersebut direpresentasikan dapat memengaruhi cara masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, dalam memahami dan memaknai peristiwa yang terjadi.

Secara teoretis, penelitian ini penting karena memperluas penerapan Analisis Wacana Kritis (AWK) dalam konteks komunikasi pemerintahan daerah. Selama ini, kajian AWK lebih banyak digunakan untuk menganalisis pemberitaan media massa arus utama atau media nasional, sementara kajian terhadap teks berita yang diproduksi oleh instansi pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, dalam sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik, Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi publik serta menyampaikan berbagai informasi resmi pemerintah kepada masyarakat.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam melihat bagaimana komunikasi publik pemerintah daerah disampaikan kepada masyarakat, khususnya melalui berita yang dipublikasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks peristiwa tertentu seperti

peristiwa yang terjadi di Gedung Negara Graha di Surabaya, cara pemerintah menyampaikan informasi kepada publik menjadi aspek yang penting karena berkaitan dengan transparansi informasi, akurasi pemberitaan, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, analisis terhadap wacana yang dibangun dalam teks berita pemerintah menjadi relevan untuk memahami bagaimana suatu peristiwa direpresentasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat kecenderungan bahwa pemberitaan mengenai suatu peristiwa sering kali dibingkai melalui pilihan bahasa tertentu yang dapat memengaruhi cara peristiwa tersebut dipahami oleh publik. Namun demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang secara khusus menelaah berita yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai sumber informasi resmi pemerintah daerah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana narasi institusional pemerintah dibangun dan disampaikan kepada masyarakat melalui teks berita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian serta memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan strategi komunikasi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Permasalahan penelitian ini bertumpu pada konstruksi realitas, yakni bagaimana peristiwa Graha di direpresentasikan dalam berita Dinas Kominfo Jatim. Representasi tersebut mencakup penempatan aktor sosial, penonjolan atau pengaburan peran tertentu, serta legitimasi terhadap tindakan aparat keamanan. Penelitian ini adalah strategi kebahasaan yang digunakan dalam teks berita, seperti pemilihan diksi, struktur kalimat, penggunaan bentuk pasif, nominalisasi, serta pengulangan kata atau frasa tertentu. Dalam kerangka Fairclough, aspek linguistik tersebut tidak sekadar bersifat teknis, melainkan mengandung muatan ideologis yang dapat memengaruhi pembentukan makna di tingkat publik. Kesenjangan potensial antara narasi resmi pemerintah dan pengalaman empiris masyarakat menjadi titik problematis yang perlu dikaji secara kritis. Apabila narasi yang dibangun lebih menitikberatkan pada aspek ketertiban umum dibandingkan akar konflik kebijakan, maka terdapat kemungkinan reduksi makna terhadap kompleksitas persoalan sosial-politik yang terjadi.

Penting untuk dipahami bahwa dalam kajian Analisis Wacana Kritis (AWK), penggunaan bahasa tidak pernah terlepas dari kepentingan ideologis. Bahasa dipandang sebagai cerminan dari struktur sosial dan kecenderungan pribadi produsen teks (Fauzan, 2013). Oleh karena itu, setiap media memiliki model pembingkai (*framing*) yang berbeda-beda, yang senantiasa dipengaruhi oleh idealisme, motivasi politik, hingga kepentingan ekonomi media yang bersangkutan (Cenderamata & Darmayanti, 2018). Apakah Dinas Kominfo Jatim memosisikan peristiwa tersebut sebagai tindakan anarkisme murni atau sebagai bentuk perjuangan hak sipil merupakan hasil dari pilihan-pilihan linguistik yang sengaja diambil.

Jika media massa dianggap terlalu bias dalam mendukung narasi pemerintah tanpa memberikan ruang kritis, maka hal ini berisiko meruntuhkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), baik terhadap institusi yang diberitakan maupun terhadap kredibilitas media itu sendiri (Handaningtias dkk., 2022).

Ketertarikan terhadap penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Secara objektif, Insiden Graha merupakan peristiwa aktual yang berdampak pada stabilitas sosial dan citra Dinas Kominfo di Jawa Timur. Peristiwa ini juga berkaitan langsung dengan dinamika implementasi UU Cipta Kerja yang secara nasional memicu kontroversi berkepanjangan. Secara subjektif, penelitian ini selaras dengan minat akademik peneliti dalam bidang komunikasi publik dan literasi media, khususnya dalam mengkaji bagaimana teks institusional mampu membentuk persepsi publik secara sistematis.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempublikasikan berita mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik karena Gedung Negara Grahadi merupakan salah satu bangunan bersejarah sekaligus simbol pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada bangunan, tetapi juga memunculkan berbagai respons dari pemerintah daerah serta para ahli terkait langkah penanganan dan upaya pemulihan bangunan tersebut.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempublikasikan beberapa berita yang menjelaskan kondisi pasca kejadian serta respons berbagai pihak terhadap insiden tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dua berita yang dipublikasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sebagai objek analisis, yaitu berita berjudul “Gubernur Khofifah Tinjau Kondisi Pasca Kebakaran Gedung Negara Grahadi” dan “Pakar Konservasi Ingatkan Restorasi Gedung Negara Grahadi Harus Dilakukan Hati-hati.”

Berita pertama berjudul “Gubernur Khofifah Tinjau Kondisi Pasca Kebakaran Gedung Negara Grahadi” memuat informasi mengenai kunjungan Gubernur Jawa Timur ke lokasi Gedung Negara Grahadi untuk meninjau secara langsung kondisi bangunan setelah terjadinya kebakaran. Berita tersebut menampilkan peran pemerintah dalam merespons kejadian tersebut, sekaligus menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam memastikan penanganan serta pemulihan bangunan berjalan dengan baik. Melalui pemberitaan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai kondisi terkini bangunan serta komitmen pemerintah dalam menangani dampak dari peristiwa tersebut.

Sementara itu, berita kedua yang berjudul “Pakar Konservasi Ingatkan Restorasi Gedung Negara Grahadi Harus Dilakukan Hati-hati” menampilkan pandangan dari pakar konservasi terkait proses pemulihan bangunan bersejarah tersebut. Dalam berita ini, aspek pelestarian bangunan bersejarah menjadi perhatian utama, mengingat Gedung Negara Grahadi memiliki nilai historis yang penting bagi Provinsi Jawa Timur. Melalui pemberitaan ini, publik tidak hanya memperoleh informasi mengenai kondisi bangunan, tetapi juga mendapatkan perspektif dari pihak ahli mengenai pentingnya proses restorasi yang dilakukan secara hati-hati agar nilai historis bangunan tetap terjaga.

Kedua berita tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur membangun dan menyampaikan narasi komunikasi pemerintah terkait insiden kebakaran Gedung Negara Grahadi. Melalui penggunaan bahasa, cara penyusunan informasi, serta penonjolan aktor tertentu dalam teks berita, dapat diamati bagaimana peristiwa tersebut direpresentasikan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis untuk mengkaji bagaimana wacana mengenai insiden Grahadi dikonstruksikan dalam berita yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya difokuskan pada isi teks berita, tetapi juga pada bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk representasi peristiwa, bagaimana aktor-aktor tertentu dimunculkan dalam narasi berita, serta bagaimana konteks sosial yang lebih luas memengaruhi pembentukan wacana tersebut.

Dengan menganalisis kedua berita tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana institusi pemerintah membangun penyampaian informasi oleh pemerintah melalui media resmi terkait suatu peristiwa, serta bagaimana wacana yang dibangun tersebut berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam penelitian ini, teori relasi kuasa Michel Foucault digunakan untuk membaca berita Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sebagai wacana institusional yang membawa otoritas simbolik dalam merespons Insiden Grahadi Surabaya. Berita sebagai produk komunikasi resmi memuat klaim pengetahuan yang diposisikan sebagai kebenaran sah, sehingga berpotensi menormalisasi perspektif tertentu mengenai peristiwa, aktor yang terlibat, serta legitimasi tindakan pemerintah dan aparat. Melalui relasi kuasa pengetahuan, narasi resmi membentuk kerangka pemahaman publik tentang konflik dan mengarahkan penilaian masyarakat terhadap situasi yang terjadi.

Lebih lanjut, relasi kuasa dalam berita Dinas Kominfo Jatim dapat dipahami sebagai bagian dari praktik diskursif negara dalam mengelola krisis sosial. Pilihan bahasa, penekanan isu, dan penataan aktor dalam narasi resmi merupakan mekanisme diskursif yang mengarahkan makna tentang apa yang dianggap rasional, sah, dan patut didukung. Dalam perspektif Foucault, praktik ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi kebenaran yang tampak wajar dan tidak problematis. Namun, sesuai tesis Foucault tentang keberadaan resistensi, ruang bagi wacana tandingan tetap terbuka melalui pengalaman masyarakat, pemberitaan alternatif, serta diskursus kritis yang menantang narasi resmi.

Dengan demikian, teori relasi kuasa Michel Foucault memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi melalui produksi wacana, legitimasi pengetahuan, dan normalisasi makna dalam komunikasi institusional. Penerapan teori ini dalam penelitian tentang berita Dinas Kominfo Jatim terkait Insiden Grahadi Surabaya memungkinkan pengungkapan mekanisme kuasa pengetahuan yang membentuk representasi peristiwa, memosisikan aktor, serta memengaruhi persepsi publik, sekaligus membuka ruang analitis untuk membaca dinamika resistensi di ruang publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk membongkar "agenda tersembunyi" di balik penggunaan bahasa dalam berita "Gubernur Khofifah Tinjau Kondisi Pasca Kebakaran Gedung Negara Grahadi" dan "Pakar Konservasi Ingatkan Restorasi Gedung Negara Grahadi Harus Dilakukan Hati-hati" (Fauzan, 2013). Melalui judul "Analisis Wacana Kritis terhadap berita Insiden Grahadi Surabaya pada Dinas Kominfo Provinsi Jatim", diharapkan dapat terungkap bagaimana media berperan dalam mengonstruksi krisis dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi serta perubahan sosial di Jawa Timur. Penelitian ini menjadi langkah krusial dalam memberikan edukasi literasi media yang lebih mendalam bagi publik agar lebih kritis dalam menyerap informasi di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konstruksi wacana dalam pemberitaan Peristiwa Grahadi Surabaya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial.

Objek penelitian berupa dua berita resmi Dinas Kominfo Jatim yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis melalui tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursus, dan praktik sosial. Analisis teks berfokus pada aspek linguistik seperti diksi dan struktur kalimat, praktik diskursus mengkaji proses produksi dan distribusi berita, sedangkan praktik sosial mengaitkan temuan dengan konteks sosial-politik serta relasi kuasa antara pemerintah dan Masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bagaimana berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan institusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada level teks (dimensi mikro), penelitian ini menemukan bahwa penggunaan bahasa dalam pemberitaan cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang dominan dalam membangun narasi peristiwa. Dominasi tersebut terlihat melalui pemilihan diksi yang bernuansa positif dan persuasif, seperti “meninjau”, “memastikan”, “mengamankan”, dan “menangani”, yang secara tidak langsung membentuk citra pemerintah sebagai pihak yang aktif, responsif, dan memiliki kendali atas situasi. Selain itu, struktur kalimat yang digunakan dalam berita juga memperlihatkan kecenderungan tertentu, terutama melalui penggunaan kalimat pasif yang menyebabkan aktor lain, seperti demonstran atau pihak yang terlibat dalam konflik, menjadi kurang terlihat secara eksplisit. Strategi kebahasaan semacam ini berfungsi untuk menggeser perhatian pembaca dari konflik yang terjadi menuju upaya penanganan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, teks berita tidak hanya berfungsi menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk sudut pandang tertentu mengenai realitas sosial yang sedang terjadi. Penggunaan bahasa dalam berita menunjukkan bahwa media institusional memiliki kecenderungan untuk menciptakan representasi yang mendukung stabilitas dan legitimasi kekuasaan.

Pada level praktik diskursus (dimensi meso), penelitian menunjukkan bahwa proses produksi berita sangat dipengaruhi oleh kepentingan institusi pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam penyebaran informasi publik. Proses produksi berita berlangsung melalui mekanisme institusional yang cenderung mengutamakan sumber-sumber resmi, seperti pernyataan pejabat pemerintah, lembaga terkait, maupun data yang telah disahkan oleh instansi tertentu. Dominasi penggunaan sumber resmi tersebut membuat perspektif yang dihadirkan dalam teks berita lebih banyak merepresentasikan sudut pandang pemerintah dibandingkan kelompok masyarakat lain yang turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Akibatnya, narasi yang berkembang di ruang publik sering kali dibangun berdasarkan kepentingan institusi dalam menjaga citra, legitimasi, serta stabilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam praktiknya, proses seleksi informasi juga menunjukkan adanya kecenderungan tertentu dalam menentukan isu mana yang dianggap layak diberitakan dan bagaimana isu tersebut dibingkai. Informasi yang berpotensi mendukung citra positif pemerintah cenderung memperoleh ruang pemberitaan yang lebih besar, sedangkan informasi yang dapat memunculkan kritik atau kontroversi sering kali disajikan secara terbatas atau bahkan tidak dimunculkan secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa media institusional tidak sepenuhnya bekerja secara netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan organisasi dan kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, proses produksi berita tidak hanya sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga melibatkan proses konstruksi realitas sosial sesuai dengan kepentingan institusi yang memproduksinya.

Dalam proses distribusinya, media daring yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan narasi institusional kepada masyarakat. Pemanfaatan platform digital memungkinkan informasi disebarkan secara cepat, masif, dan mudah diakses oleh publik tanpa adanya batasan ruang maupun waktu. Kecepatan distribusi tersebut menjadikan media daring sebagai sarana strategis bagi pemerintah dalam membangun arus informasi yang terpusat pada narasi resmi institusi. Publik pada akhirnya lebih sering menerima informasi yang telah dikemas melalui sudut pandang pemerintah sehingga opini masyarakat secara tidak langsung diarahkan untuk memahami peristiwa berdasarkan kerangka yang telah dibangun oleh institusi.

Di sisi lain, keberadaan media daring juga memperkuat posisi pemerintah sebagai aktor dominan dalam produksi wacana publik. Melalui media resmi, pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar terhadap isi informasi, pemilihan bahasa, serta penentuan fokus pemberitaan. Kondisi ini menyebabkan ruang bagi perspektif alternatif, kritik masyarakat, maupun suara kelompok tertentu menjadi lebih terbatas. Kelompok masyarakat yang terdampak langsung dalam suatu peristiwa sering kali tidak memperoleh ruang representasi yang seimbang dibandingkan sumber resmi pemerintah. Akibatnya, praktik diskursus yang terjadi cenderung menghasilkan ketimpangan representasi dalam pemberitaan.

Lebih jauh lagi, praktik konsumsi informasi oleh masyarakat juga turut dipengaruhi oleh perkembangan media digital. Masyarakat yang mengakses informasi melalui media daring pemerintah cenderung menerima narasi yang telah dikonstruksi secara institusional tanpa banyak melakukan verifikasi terhadap sumber lain. Tingginya intensitas penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari membuat narasi resmi pemerintah lebih mudah diterima dan direproduksi kembali oleh publik melalui berbagai platform media sosial. Dengan demikian, proses konsumsi informasi tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat dominasi wacana yang telah dibangun oleh institusi pemerintah.

Oleh karena itu, praktik diskursus dalam pemberitaan tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan kepentingan yang memengaruhi proses produksi, distribusi, serta konsumsi teks berita. Media institusional pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi alat strategis dalam membentuk opini, mengarahkan persepsi publik, serta mempertahankan legitimasi kekuasaan pemerintah di ruang publik. Dengan kata lain, media bukan sekadar medium penyampai informasi, melainkan juga arena produksi makna yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan institusional yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, pada level praktik sosial (dimensi makro), pemberitaan mengenai Peristiwa Grahadi Surabaya mencerminkan adanya relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembentukan realitas sosial di ruang publik. Pemerintah diposisikan sebagai aktor dominan yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan realitas, menentukan arah pemberitaan, serta membangun makna tertentu atas suatu peristiwa yang terjadi. Dominasi tersebut tampak melalui narasi pemberitaan yang lebih banyak menekankan aspek stabilitas, keamanan, dan pengendalian situasi, sehingga publik diarahkan untuk memahami peristiwa sebagai kondisi yang tetap terkendali meskipun di dalamnya terdapat konflik sosial, ketegangan, maupun dinamika kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk persepsi publik mengenai bagaimana suatu peristiwa harus dipahami.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah bersifat netral karena selalu berkaitan dengan praktik kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu. Bahasa dalam media digunakan bukan hanya untuk mendeskripsikan realitas, tetapi juga untuk membentuk realitas sosial melalui pilihan kata, struktur kalimat, serta cara suatu peristiwa direpresentasikan kepada masyarakat. Pilihan diksi yang digunakan dalam pemberitaan, misalnya kata-kata yang menekankan ketertiban, keamanan, atau pengendalian situasi, secara tidak langsung membangun citra pemerintah sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan legitimasi dalam mengatasi konflik yang terjadi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang melakukan aksi atau

menyampaikan kritik sering kali direpresentasikan secara lebih terbatas sehingga posisi mereka tampak kurang dominan dalam pembentukan narasi publik.

Lebih jauh lagi, praktik sosial dalam pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana media institusional berperan dalam mempertahankan hegemoni kekuasaan pemerintah. Hegemoni terjadi ketika nilai, pandangan, dan kepentingan kelompok dominan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan benar tanpa adanya paksaan secara langsung. Melalui pemberitaan yang terus-menerus menampilkan sudut pandang resmi pemerintah, masyarakat secara perlahan diarahkan untuk menerima narasi dominan tersebut sebagai bentuk kebenaran yang objektif. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai alat ideologis yang membantu mempertahankan legitimasi kekuasaan melalui produksi dan reproduksi wacana tertentu di ruang publik.

Selain itu, pemberitaan mengenai Peristiwa Grahadi Surabaya juga mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap representasi di media. Pemerintah sebagai institusi yang memiliki sumber daya, kewenangan, dan akses terhadap media lebih mudah menyampaikan pandangannya kepada publik dibandingkan kelompok masyarakat biasa. Ketimpangan ini menyebabkan suara masyarakat, terutama kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemerintah, tidak selalu memperoleh ruang yang setara dalam pemberitaan. Akibatnya, realitas sosial yang diterima masyarakat cenderung didominasi oleh perspektif kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengontrol arus informasi.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, perkembangan media digital juga memperkuat proses penyebaran ideologi dan kepentingan institusional tersebut. Informasi yang dipublikasikan melalui media daring pemerintah dapat dengan cepat disebarluaskan kembali melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Kondisi ini membuat narasi resmi pemerintah lebih mudah mendominasi ruang publik karena memiliki jangkauan distribusi yang luas dan intensitas penyebaran yang tinggi. Di sisi lain, masyarakat sering kali mengonsumsi informasi secara cepat tanpa melakukan proses verifikasi yang mendalam, sehingga narasi dominan yang dibangun media institusional lebih mudah diterima dan dipercaya.

Pemberitaan yang diproduksi oleh institusi pemerintah pada akhirnya menjadi bagian dari proses normalisasi makna, yaitu upaya untuk membangun pemahaman tertentu agar diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Normalisasi ini terjadi melalui pengulangan narasi, penggunaan bahasa yang terkesan objektif, serta penonjolan sudut pandang tertentu secara konsisten dalam pemberitaan. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu memengaruhi cara masyarakat berpikir, memahami realitas, dan menilai suatu peristiwa.

Oleh karena itu, pada level praktik sosial, pemberitaan mengenai Peristiwa Grahadi Surabaya menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk konstruksi sosial masyarakat. Media tidak berdiri secara independen dan bebas nilai, melainkan berada dalam relasi kekuasaan yang memengaruhi proses produksi makna di ruang publik. Dalam perspektif Fairclough, wacana media menjadi arena pertarungan ideologi dan kepentingan, di mana kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung mampu mendominasi representasi realitas sosial. Dengan kata lain, pemberitaan media bukan hanya mencerminkan realitas yang terjadi, tetapi juga turut membentuk realitas sosial sesuai dengan kepentingan dan ideologi pihak yang memiliki otoritas dalam proses produksi informasi.

KESIMPULAN

Dari kedua berita yang dianalisis, terlihat adanya kecenderungan ideologis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang rasional, bertanggung jawab, dan memiliki kendali penuh atas situasi. Narasi yang dibangun secara konsisten mengarah pada penguatan citra institusi serta stabilitas sosial, sementara aspek konflik, kritik, atau perspektif alternatif tidak ditampilkan secara signifikan.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wacana yang dibangun dalam berita Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur cenderung menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang dominan, rasional, dan memiliki kontrol terhadap situasi, sementara aktor lain seperti masyarakat tidak memperoleh representasi yang seimbang. Melalui pilihan bahasa, struktur penyajian, serta penekanan isu tertentu, wacana yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana legitimasi institusional dan pembentukan citra positif pemerintah. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa konstruksi wacana dalam berita tersebut selaras dengan kepentingan komunikasi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan persepsi publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ibu Nara Garini Ayuningrum, S.Tr.I.Kom., M.A. dan Bapak Mohammad Insan Romadhan, S.I.Kom., M.Med.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas penunjang penelitian. Selain itu, penghargaan diberikan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai sumber data penelitian melalui publikasi berita resmi yang dianalisis dalam penelitian ini. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada keluarga, teman-teman, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan artikel. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang analisis wacana kritis dan media komunikasi publik.

REFERENSI

- Cenderamata, R. C., & Darmayanti, N. (2018). Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring. *Department of Linguistics, Faculty of Humanities Universitas Padjadjaran*.
- Devi, A. M., Salsabila, K. P., Panguripan, A. D., Iuvena, L. A., Kamilah, A. S., & Anhar. (2025). Representasi Ideologi Provokatif Detik.com tentang Demonstrasi Politik: Analisis Wacana Kritis. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1351-1362.
- Fauzan, U. (2013). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough. *Pendidik*, 5(2), 1-15.
- Handaningtias, U. R., Praceka, P. A., & Indriyany, I. A. (2022). Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Publik Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis. *International Journal of Demos*, 4(3).
- Jannah, F. N., Fatonah, A. R., & Turnip, M. (2023). Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Opini Publik di Media Sosial Twitter. *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science*, 5(2).

- Putri, W. E., Afrilia, A. M., Istiyanto, S. B., & Hermawan, R. R. (2024). Analisis Wacana pada Akun Twitter @DivHumas_Polri dalam Manajemen Krisis Tragedi Kanjuruhan. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 254-271.
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 18-29.